

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta Karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen Perencanaan PD untuk Program dan kegiatan dalam 1(satu) tahun dan memuat Rencana Kerja Program dan Kegiatan, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur DISNAKERTRANS Kabupaten Tana Tidung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tideng Pale, 01 September 2



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Evaluasi Renja PD Tahun Lalu.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	29
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.....	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Akhir PD.....	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	47
BAB V Penutup.....	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (1) dan (2) bahwa

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah, Humanis (BERSIH)”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai Misi Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah;
3. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam;
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatkan kemandirian Desa;
6. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik;
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah;

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung terkait langsung pada Misi ke-3, yaitu:

“Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam”

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung tahun berikutnya yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Akhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya masyarakat transmigran yang mandiri;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Akhir SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.
Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh

mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : Evaluasi Program Tahun 2025

Alokasi anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar Rp. 6.600.702.00 untuk tahun anggaran 2025 yang terdiri dari belanja langsung, adapun belanja langsung digunakan untuk

belanja pegawai (honorarium PNS dan non PNS), belanja barang/jasa dan belanja modal.

Adapun rincian anggaran dan realisasi keuangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tana Tidung
Tahun Anggaran 2024

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp.	%
BELANJA LANGSUNG			
- <i>Belanja Pegawai</i>	3.557.138.936.00	3.105.002.095.00	87.29
- <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.828.422.977.00	2.555.296.453.00	90.34
- <i>Belanja Modal</i>	215.140.232.00	190.420.000.00	88.51
J U M L A H	6.600.702.145.00	5.850.718.548.00	88,64

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan Desember 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar Rp. 5.850.718.548,00 atau 88,64 % dari total anggaran sebesar Rp. 6.600.702.145,00 per 31 Desember 2024.

Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung untuk tahun anggaran 202 terdiri 7 program dan 30 Kegiatan.

Tabel 2.2
Rincian Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	BOBOT	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (RP)
		RP		FISIK	TERTIMBANG	KEUANGAN	KEUANGAN	
				(%)	(%)	(RP)	(%)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota							
	Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi Kinerja perangkat daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.200.00				4.999.200.00	100	0
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tugangan ASN	3.426.618.936.00				2.974.482.095,00	86.81	452.136.841,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.520.000.00				130.520.000.00,-	100	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan bahan logistik kantor	76.921.810,00				74.138.972.00	96,38	2.782.838,00

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.700.700,00				7.337.000,00	95,28	363.700,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.616.528,00				437.684.024,00	99,79	932.504,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.156.850,00				8.100.000,00	99,30	56.850,00
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	316.975.368,00				298.686.952,00	94,23	18.288.416,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.199.680,00				245.809.380,00	99,84	390.300,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.494.500,00				17.573.000,00	81,76	3.921.500,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.010.000,00				11.765.000,00	83,08	2.245.000,00
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi							
	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	955.366.310,00				912.526.401,00	95,52	42.839.909,00
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							

	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota							
	Pencegahan perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.838.125,00				42.368.000,00	98,90	470.125,00
	Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.141.000,00				70.882.000,00	98,25	1.259.000,00
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	73.598.000,00				54.112.000,00	73,52	19.486.000,00
4	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi							
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	565.021.720,00				362.164.6540,00	64,10	202.857.066,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian							
	Penguatan insfrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman	199.523.418,00				197.569.870,00	99,02	1.953.548,00
TOTAL		6.600.702.145,00				5.850.718.548,00	88,64	749.983.597,00

Berdasarkan Hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

- a) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- b) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja;
- c) Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai;
- d) Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus APL (Areal Penggunaan Lain)/Areal Bukan Kawasan Hutan untuk pencadangan areal pemukiman baru;
- e) Kurang minatnya peserta program transmigrasi;
- f) Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025 sesuai visi dan misi Bupati Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Akhir Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tana Tidung

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	100 %	'98,31 %	100 %	'98,31 %	95,68%	100 %		
					- Perencanaan Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pemerintah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100%	96,09%			

07	01	2	01	01	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	95,68%			
07	01	01	2	06	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan dokumen Capaian Kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	94,68%			
07	01	2	02		-	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terwujudnya Pengelolaan	100%	100%	100%	100%	79,26%	100%		
07	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji pokok dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80,77%	12 Bulan		
07	01	2	02	02	-	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honorium pelaksana kegiatan dan tim pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	65,76%	12 Bulan		
07	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	86,75%	100%		
07	01	2	06	01	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	78,15%	1 Paket		

07	01	2	06	01		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	94,38	1 Paket		
07	01	2	06	04	-	Penyediaan bahan logistic kantor		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	94,38%	1 paket		
07	01	2	06	05	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	66,03%	12 Bulan		
07	01	2	06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jumlah bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	83,33%			
07	01	2	06	09	-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	94,32%			
07	01	2	07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	78,30%	100%		
07	01	2	07	05	-	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Pake	78,30%			

32	04	2	08		-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	98,31%	100%		
07	01	2	08	01	-	Penyesiaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	98,31%	1 Paket		
07	01	2	08	02	-	Penyediaan jasa komunikasi,Su mberdaya air dan listrik	Jumlah pembayaran internet,air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	79,17%	12 Bulan		
07	01	2	08	04	-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Upah Tenaga Honorer/kontrak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,72%	12 Bulan		
07	01	2	09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase tersedianya biaya pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	71,71%			
07	01	2	09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	66,21%			
07	01	2	09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	94,89%	12 Bulan		

2	07	03				Program pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga bersertifikat kompetensi	22%	100%	22%	100%	85,66%	40%		
07	03	2	01	01	-	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan kompetensi	16 Orang	16 Orang	16 orang	16 orang	85,66%	16 Orang		
2	07	04				Program penempatan tenaga kerja	Persentase tingkat produktivitas tenaga kerja						40%		
07	04	2	01	03	-	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan						1 Kegiatan		
2	07	05				Program hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	100%	100%	100%	100%	94,81%			
07	05	2	01	01		Pencegahan perselisihan Hubungan industrial, mog ok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ko ta	Jumlah kegiatan sosialisai yang dilaksanakan						1 Kegiatan		

07	05	2	01	03		Penyelenggaraan pelatihan dan informasi sarana hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelolah kerja yang layak/sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							3 Perusahaan		
07	05	2	02	02	-	Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/kota	Jumlah kasus yang diselesaikan	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	94,81%				
07	05	2	02	05	-	Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Jumlah kegiatan Rapat UMK kabb. Tana Tidung yang ditetapkan	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	96,78%				
3	32	02				Program perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase pencadangan Areal tanah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	98,19%	100%			
32	02	2	01	01	-	Penata usahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi pencadangan areal tanah yang telah diukur dan rancang kapling						1 lokasi			

32	02	2	01	03	-	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah HPL yang bersertifikat	2 HPL	2 HPL	2 HPL	2 HPL	98,19%			
3	32	04				Program pengembangan kawasan Transmigrasi	Persentase lokasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	98,98%			
32	04	2	01	02	-	Penguatan Infrastruktur Sosial,ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kawasan transmigrasi yang ditata	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	98,98%	1 Lokasi		

Tabel 2.4
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanaan Dasar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya Penunjang Urusan pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota	100 %	98,31%	Tidak ada permasalahan,realisasi sesuai dengan target yang dicapai	Capaian kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang diinginkan	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	95,68 %			
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	5 Laporan	94,68%	Realisasi belum mencapai target dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga belum mencapai target maksimal	Dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan waktu perencanaan sehingga dapat mencapai target maksimal	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja
				2	Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79,265			
					Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Pembayaran honorarium kegiatan	12 Bulan	65,76%			

			3	Program administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Tersediannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	86,75 %	Realisasi belum mencapai target dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga belum mencapai target maksimal	Capaian kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang diinginkan.	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja
				Penyediaan pelaksanaan dan perlengkapan kantor	Jumlah kelengkapan computer, mesin ketik dan mesin penghancur kertas	1 paket	78,15%			
				Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	1 Paket	94,38 %		.	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan surat dan dokumen	12 Bulan	66,03%			
				Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	83,33 %			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	94,32%			
			4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Tersediannya biaya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	71,71%	Realisasi belum mencapai target dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga belum	Dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan waktu perencanaan	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja

			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	94,89%	mencapai target maksimal	sehingga dapat mencapai target maksimal	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan operasional kantor	12 bulan	66,21%			
		5	Program Pengandaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	78,30%	Realisasi belum mencapai target karena waktu pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga belum mencapai target maksimal	Dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan waktu perencanaan sehingga dapat mencapai target maksimal	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja
			Pengadaan mebel	Jumlah set mebel yang terbeli	1 unit	78,30	Belum terselesainya permasalahan dengan masyarakat setempat dan belum dilakukan revisi kawasan	Akan terus dilakukan upaya terkait program dan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan perencanaan	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja
			Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah lahan transmigrasi yang siap dikembangkan sebagai sumber ekonomi	80 Kapling	80 Kapling	Tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan ini dan realisasi kegiatan telah memenuhi target yang ditentukan	Capaian kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang diinginkan.	Tidak ada permasalahan dalam pencapaian target program dan kegiatan ini

			Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	22%	85,66%	Tidak ada permasalahan realisasi sesuai dengan target yang dicapai	Capaian kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang dicapai	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan Indikator Kinerja
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan Kompetensi	16 Orang					
				7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	100%	94,81%	Tidak ada permasalahan realisasi sesuai dengan target yang dicapai	Capaian kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang diinginkan	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai indikator Kinerja
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	2 Kasus	2 Kasus			

					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kegiatan Rapat UMK Kab. Tana Tidung yang ditetapkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Mensikronisasikan dan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi lintas sektoral	8	Program pengembangan wilayah Transmigrasi	Presentase satuan permukiman kawasan Transmigrasi yang Mandiri	100%	96,98%	Tidak ada permasalahan realisasi sesuai dengan target yang dicapai	Capaian kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang diinginkan	Akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan indikator kinerja
					Penguatan Insfrastruktur Sosial Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah kawasan transmigrasi yang ditata	5 kawasan	5 Kawasan			
				9	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pencadangan Areal tanah yang tersedia	100%	98.19%	Tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan ini dan realisasi kegiatan telah memenuhi target yang ditentukan	Capaian Kinerja dapat dipertahankan sesuai dengan target yang diinginkan	Tidak ada permasalahan dalam mencapai target program dan kegiatan ini
					Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi kawasan transmigrasi yang bersertifikat	2 lokasi	2 lokasi			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Adapun susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsosnaker;
4. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat;
 - b. Seksi Pemukiman, Perpindahan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	%			94,74	95,88	96,03	96,19	66	67	69	71	69,66	69,88	71,85	73,81
2	Tingkat Penggangguran Terbuka	%			5,26	4,12	3,97	3,81	5,26	3,33	3,24	3,67	100	80,83	81,61	96,33
3	Tingkat rata-rata pendapatan transmigrans	Rp			2300000	2700000	2800000	2900000	2300000	2700000	2800000	2900000	100	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Tana Tidung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas tenaga kerja;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas transmigrasi;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung. Berikut tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan AKHIR RKPD Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tana Tidung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan (Kepmen 50 Tahun 2021)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan (Kepmen 50 Tahun 2021)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISNAKERT RANS	100%	4.508.521.211,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISNAKERT RANS	100%	4.899.258.633,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISNAKERT RANS	100%	27.320.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISNAKERT RANS	100%	15.448.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	DISNAKERT RANS	10 Dokumen	8.452.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	DISNAKERT RANS	10 Laporan	10.448.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang tersusun	DISNAKERT RANS	2 Dokumen	5.000.000,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang tersusun	DISNAKERT RANS	2 Laporan	5.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISNAKERT RANS	100%	50.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISNAKERT RANS	100%	29.028.000,00	

	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	DISNAKERT RANS	7 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	DISNAKERT RANS	4 Orang	29.028.000,00	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersediannya biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>DISNAKERTRANS</i>	<i>100%</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersediannya biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>DISNAKERTRANS</i>	<i>100%</i>	<i>82.563.300,00</i>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Kantor	DISNAKERT RANS	12 Bulan	25.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Kantor	DISNAKERT RANS	12 Unit	74.393.300,00	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	DISNAKERT RANS	12 Bulan	20.000.000,00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	DISNAKERT RANS	12 Unit	8.170.000,00	✓
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>DISNAKERT RANS</i>	<i>1 Unit</i>	<i>523.750.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>DISNAKERT RANS</i>	<i>1 Unit</i>	<i>523.750.000</i>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		DISNAKERT RANS	1 Unit	523.750.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		DISNAKERT RANS	1 Unit	523.750.000	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>DISNAKERTRANS</i>	<i>100%</i>	<i>2.316.734.282,10</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>DISNAKERTRANS</i>	<i>100%</i>	<i>3.702.592.739,00</i>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DISNAKERT RANS	12 Bulan	2.057.394.408,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DISNAKERT RANS	12 Orang/ Bulan	3.577.492.739,00	

	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pelaksanaan kegiatan	DISNAKERT RANS	12 Bulan	250.000.000,00	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium kegiatan	DISNAKERT RANS	12 Dokumen	125.100.000,00	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>DISNAKERTRANS</i>	100%	259.000.000,00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>DISNAKERTRANS</i>	0	359.764.594,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Kelengkapan Komputer, Mesin Ketik dan Mesin Penghancur kertas	DISNAKERT RANS	-	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Kelengkapan Komputer, Mesin Ketik dan Mesin Penghancur kertas	DISNAKERT RANS	2 Paket	29.578.300,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	DISNAKERT RANS	1 Paket	20.000.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	DISNAKERT RANS	1 Paket	51.422.894,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan surat dan dokumen	DISNAKERT RANS	12 Bulan	30.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan cetak dan penggandaan surat dan dokumen	DISNAKERT RANS	12 Paket	10.000.400,00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	DISNAKERT RANS	12 Bulan	204.000.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	DISNAKERT RANS	12 Laporan	268.763.000,00	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>DISNAKERTRANS</i>	100%	216.800.000,00	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>DISNAKERTRANS</i>	100%	217,103,530,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	DISNAKERT RANS	12 Bulan	15.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	DISNAKERT RANS	12 Laporan	10.000.000,00	✓
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Upah Tenaga Kontrak	DISNAKERT RANS	12 Bulan	172.800.000,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Upah Tenaga Kontrak	DISNAKERT RANS	12 Laporan	172.116.000,00	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		DISNAKERT RANS	1 Paket	25.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat tulis kantor	DISNAKERT RANS	1 Paket	3.996.000,00	
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Kabupaten Tana Tidung		5.000.000,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Kabupaten Tana Tidung		5.000.000,00	
	<i>Penyusunan Rencan Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>		5.000.000,00	<i>Penyusunan Rencan Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>		5.000.000,00	
	Penyusunan Rencan Tenaga Kerja Makro	Jumlah data PUK, AK, TPAK, Bukan AK, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPT, Tingkat Kesempatan Kerja/TKK	Kabupaten Tana Tidung	1 Perusahaan	5.000.000,00	Penyusunan Rencan Tenaga Kerja Makro	Jumlah data PUK, AK, TPAK, Bukan AK, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPT, Tingkat Kesempatan Kerja/TKK	Kabupaten Tana Tidung	1 Dokumen	5.000.000,00	
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kabupaten Tana Tidung	40%	214.000.000,00	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kabupaten Tana Tidung	40%	204.394.000,00	
	<i>Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi</i>	<i>Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan unit kompetensi</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>1 kegiatan</i>	214.000.000,00	<i>Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi</i>	<i>Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan unit kompetensi</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>1 kegiatan</i>	204.394.000,00	
	Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja	Jumlah Dokumen Kerjasama	Kabupaten Tana Tidung	1 Dokumen		Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja	Jumlah Dokumen Kerjasama	Kabupaten Tana Tidung	1 Lembaga		

	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan Kompetensi	Kabupaten Tana Tidung	16 Org	214.000.000,00	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan Kompetensi	Kabupaten Tana Tidung	16 Org	204.394.000,00	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat produktifitas tenaga kerja	Kabupaten Tana Tidung			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat produktifitas tenaga kerja	Kabupaten Tana Tidung			
	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Jumlah Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>			<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Jumlah Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>			
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Perangkat Keras dan Lunak	Kabupaten Tana Tidung	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Perangkat Keras dan Lunak	Kabupaten Tana Tidung	1 Unit	-	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi pasar kerja online	Jumlah lowongan kerja tersedia	Kabupaten Tana Tidung	20 Lowongan	1.000.000,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi pasar kerja online	Jumlah lowongan kerja tersedia	Kabupaten Tana Tidung	20 Lowongan	60,165,400,00	
	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Kabupaten Tana Tidung			Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Kabupaten Tana Tidung			
	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Tana Tidung	1 Kegiatan	1.000.000,00	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Tana Tidung	1 Kegiatan	6,300,000,00	
	Pelayanan antar kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kabupaten Tana Tidung	100 Orang		Pelayanan antar kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kabupaten Tana Tidung	100 Orang		
5	Program hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama	Perusahaan di KTT	100%	250.000.000,00	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	Perusahaan di KTT	100%	160.478.500,00	

	<i>Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Sekala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga Kerjaan</i>	Perusahaan di KTT			<i>Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Sekala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga Kerjaan</i>	Perusahaan di KTT			
	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak / sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Perusahaan di KTT	3 Perusahaan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak / sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Perusahaan di KTT	3 Perusahaan	60,165,400,00	
	<i>Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jumlah kasus yang difasilitasi</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>100%</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jumlah kasus yang difasilitasi</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>100%</i>	449.468.542,00	
	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Perusahaan di ktt	1 Kegiatan	50,000,000,00	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Perusahaan di Ktt	1 Perkara	4,476,000,00	

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah laporan hasil mediasi kasus yang diselesaikan	Perusahaan di KTT	2 Kasus	75.000.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah laporan hasil mediasi kasus yang diselesaikan	Perusahaan di KTT	2 Perkara	60,528,291,00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Kerjasama Tripartit	Perusahaan di KTT	1 Kegiatan	50.000.000,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Kerjasama Tripartit	Perusahaan di KTT	1 Lembaga		
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan keselamatan dan Kesehatan kerja	Perusahaan di KTT	1 Kegiatan	25.000.000,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah pelayanan keselamatan dan Kesehatan kerja	Perusahaan di KTT	1 Orang	384,464,251,00	
4.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase pencadangan Areal tanah yang tersedia	Kabupaten Tana Tidung	100%	250.000.000,00	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase pencadangan Areal tanah yang tersedia	Kabupaten Tana Tidung	100%	118,814,400,00	
	<i>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	<i>Persentase kawasan yang terselesaikan legalitasnya</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>100%</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	<i>Persentase kawasan yang terselesaikan legalitasnya</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>100%</i>	118,814,400,00	
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi yang bersertifikat	Kabupaten Tana Tidung	1 Lokasi	150.000.000,00	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi yang bersertifikat	Kabupaten Tana Tidung	1 Hektar	118,814,400,00	
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang ditata	Kabupaten Tana Tidung	2 Lokasi	100.000.000,00	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang ditata	Kabupaten Tana Tidung	2 Lokasi		

5.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kabupaten Tana Tidung	100%	250.000.000,00	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lokasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kabupaten Tana Tidung	100%	32,655,000,00	
	<i>Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian</i>	<i>Persentase satuan permukiman Kawasan Transmigrasi yang Mandiri</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>100%</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian</i>	<i>Persentase satuan permukiman Kawasan Transmigrasi yang Mandiri</i>	<i>Kabupaten Tana Tidung</i>	<i>100%</i>	<i>32,655,000,00</i>	
	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah satuan permukiman yang mendapat bantuan	Kabupaten Tana Tidung	1 Lokasi	100.000.000,00	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah satuan permukiman yang mendapat bantuan	Kabupaten Tana Tidung	68 Kepala keluarga		
	Penguatan Infrastruktur sosial Ekonomi dan Kelembagaan Dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditata	UPT. Tanah Merah	2 Lokasi	150.000.000,00	Penguatan Infrastruktur sosial Ekonomi dan Kelembagaan Dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditata	UPT. Tanah Merah	2 Satuan Permukiman	32,655,000,00	
	Total				3.919.863.936,95	Total				5,814,903,975	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Belum ada penambahan usulan program dan kegiatan Masyarakat yang terkait Program dan Kegiatan tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung visi misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT)

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Mandiri;
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan;
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul;
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Akhir PD

TUJUAN DAN SASARAN RENJA AKHIR PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan kebijakan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Tana Tidung di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Bupati. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung seperti yang tertuang didalam rencana strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya masyarakat transmigran yang mandiri;

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Adapun Sasaran yang dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja;
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat transmigran;

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Tana Tidung tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
Program ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja daerah
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
Program ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang bursa tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
4. Program Hubungan Industrial;
Program ini bertujuan untuk melakukan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
Program ini bertujuan membangun pemukiman transmigrasi yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Program Pengembangan Perencanaan Transmigrasi.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan merencanakan pemukiman transmigrasi

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran serta memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

BAB IV

RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

REKAPITULASI BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Sumber Dana	Pagu Belanja				Jumlah
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
0	NON URUSAN						
0	NON URUSAN						
2.07.3.32.0.00.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum	125,100,000	0	0	0	125,100,000
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum	3,577,492,739	0	0	0	3,577,492,739
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum	268,763,000	0	0	0	268,763,000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum	0	29,578,300	0	0	29,578,300
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10,000,400	0	0	0	10,000,400
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum	51,422,894	0	0	0	51,422,894

0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum	172,116,000	0	0	0	172,116,000
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	10,000,000	0	0	0	10,000,000
0.00.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	3,996,000	0	0	0	3,996,000
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum	8,170,000	0	0	0	8,170,000
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum	74,393,300	0	0	0	74,393,300
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	10,448,000	0	0	0	10,448,000
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum	5,000,000	0	0	0	5,000,000
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
0.00.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum	29,028,000	0	0	0	29,028,000
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
0.00.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum	0	523,750,000	0	0	523,750,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
2.07.3.32.0.00.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dana Alokasi Umum	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dana Alokasi Umum	6,300,000	0	0	0	6,300,000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dana Alokasi Umum	60,165,400	0	0	0	60,165,400
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dana Alokasi Umum	204,394,000	0	0	0	204,394,000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dana Alokasi Umum	38,848,000	0	0	0	38,848,000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	60,528,291	0	0	0	60,528,291
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	4,476,000	0	0	0	4,476,000
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dana Alokasi Umum	384,464,251	0	0	0	384,464,251
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
2.07.3.32.0.00.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
3.32.02.2.01	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi						
3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan	Dana Alokasi Umum	118,814,400	0	0	0	118,814,400

	Transmigrasi						
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Dana Alokasi Umum	32,655,000	0	0	0	32,655,000
TOTAL BELANJA SKPD			5,261,575,675	553,328,300	0	0	5,814,903,975

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai program dan kegiatan terkait dengan pelayanan tenaga kerja sesuai dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS). Dan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan yang berbasis pada pelayanan, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Tana Tidung adalah Program dan Kegiatan Tahunan yang selaras dengan Visi & Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Tana Tidung selain menjadi pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS), khususnya bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Tana Tidung.

Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) Akhir juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa – masa yang akan datang.

Tideng Pale, 01 September 2025

Kepala Dinas

Johari, S.Sos
NIP. 197107092002121001

